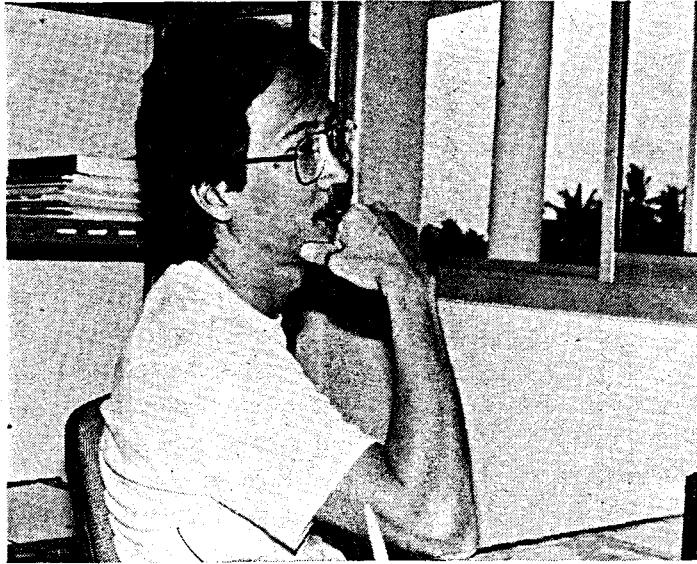


Ariel Heryanto:
**SEJARAH
MESTI
DIUBAH**



Ariel Heryanto. Menikmati pahit getir kehidupan.

SPESIAL

Bagaimana Anda melihat terjadinya pengkotak-kotakan pada saat ini, apakah semakin tajam dibanding masa lalu?

Oh, jelas dong. Saya tidak berani mengatakan semakin atau malah berkurang. Ukurannya sulit. Cuma yang menarik, kotak itu ternyata selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contoh, menurut Saya sejak tahun 90-an kotak ras sudah hilang. Hal ini bisa dijelaskan, dianalisa sosial, politik maupun ekonomi. Namun bila kita perhatikan, kotak ras hilang diganti dengan kotak agama. Rupanya salah bila orang berpikir bahwa unsur-unsur primordial hanya ada ketika jaman kuno dan akan lenyap dengan sendirinya berkembangnya kapitalisme. Nggak pernah itu, baik di Indonesia maupun di negara-negara pusat kapitalisme.

Pengkotak-kotakan itu apakah disebabkan karena kita terlanjur menjadi negara bangsa dengan latar belakang yang plural?

Tentu saja Saya nggak setuju. Kalau Anda bicara begitu, maka seakan-akan hal tersebut alamiah. Yang saya maksudkan tidak begitu. Jelas sekali ada

Ia dikenal akrab dengan aktivis mahasiswa dari berbagai PT. Wawancara dengannya dilakukan dua kali. Pertama, di kantornya yang lama. Dan kedua, dilakukan dikantornya yang baru, Gedung Pascasarjana UKSW Salatiga. Dari masalah trauma politik, hingga implementasi HAM di Indonesia.

rekayasa politik maupun ekonomi, ada yang sengaja diuntungkan rejekinya baik kelas pribumi maupun non pribumi.

Kepentingan barangkali?

Kepentingan! Dan kepentingan itu jelas sekali. Sejauh pengamatan saya, kotak-kotak itu dulu nggak jadi masalah sampai sebelum berkembangnya modernitas dan industri kapitalisme. Hal ini menarik, karena asumsi kita terhadap modernitas dan kapitalisme industri itu justeru anti pada pengkotak-kotakan. Logikanya universalisme. Pasar itu universal, tidak mengenal

pengkotakan, tapi kenyataannya justru tidak demikian. Sejarah membuktikan sebelum masuknya modernitas, pluralisme, kapitalisme, di sini orang sudah beraneka macam bangsanya. Tetapi nggak ada masalah. Jadi pluralitas kadang-kadang diterjemahkan, diinterpretasikan secara keliru. Seakan-akan yang salah pada pluralitasnya. Karena yang disalahkan pluralitas, maka menurut saya solusinya pun juga salah. Pluralitas tidak bersalah, asal tidak direkayasa, tidak diungkir balik, tidak di manipulasi untuk kepentingan tertentu. Dan ironisnya, hal ini baru muncul saat masa modernitas dan kapitalisme (tertawa). Secara resmi, untuk pertama kalinya di tingkat pemerintah, pengkotakan muncul ketika Belanda masuk ke Indonesia dan ini sampai sekarang. Jangan lupa bahwa Belanda merupakan agen pembangunan modernitas dan kapitalisme. Inilah sejarahnya, untuk itu sejarah kita harus dirubah (tertawa lagi)

Menyenggung perekayasaan tadi, bagaimana dengan trauma-trauma masa lalu yang ditampilkan pemerintah?

Ya, Jelas. Mungkin kita bisa kaitkan dengan istilah yang dalam literatur ilmu sosial sering disebut

sebagai teror politik. Teror semua politik. Jadi bila hanya menggunakan undang-undang, polisi, ABRI, rakyat masih merdeka berpikir, tidak takut. Tapi kalau sudah dengan teror, tentu akan lebih tunduk.

Teror tersebut untuk pertama kalinya digunakan pada massa G 30 S PKI yang menjadi musuh. Selanjutnya muncul wajah baru yang bernama Islam. Jadi G 30 S PKI diganti namanya menjadi ekstrem kiri, karena adanya ekstrem kanan. Kemudian muncul ekstrem-ekstrem yang lain, seperti berubah-ubah. Namun jangan lupa hal ini bukan berlangsung hanya karena ada satu pihak yang melakukannya, yakni pemerintah. Tetapi bila kita perhatikan teror tersebut bisa berlangsung ketika sudah *berkembang biak*, mandiri dalam masyarakat di luar tanggungjawab pemerintah. Contohnya, dalam tempat kita bekerja, di kampus, di mana pemerintah tidak ikut campur. Juga dalam keluarga maupun di kelas yang nota bene di luar jangkauan pemerintah. Dan pemerintah tidak bisa dituding lagi.

Lantas bagaimana mencapai bentuk yang ideal masyarakat kita dengan latar belakang yang heterogen? Bagaimana pula agar pendekatan sekuritas menjadi lebih minimal?

Saya pikir banyak yang harus kita kerjakan. Tidak ada yang mudah, semuanya sulit. Sebenarnya begini, teror-teror politik yang saya katakan di atas, tidak semuanya berasal dari pemerintah. Sebab saya amati kita seringkali menakut-nakuti diri kita sendiri sambil menakut-nakuti orang lain. Contoh, ketika ada mahasiswa yang membikin penerbitan pers dan salah seorang diantaranya menulis sesuatu hal, ada temannya yang lain mengatakan "jangan ini menakutkan!" Nah, apakah ini berasal pemerintah?

Guna mengatasi rasa takut, ada dua macam cara yang bisa kita lakukan. Pertama, mampukah kita, individu, mengatasi ketakutan masing-masing. Kedua, mengatasi ketakutan teman-teman dekat kita, bahwa hidup ini harus bekerja sama. Makanya saya selalu menganalisa bahwa takut adalah sumber dari banyaknya kegiatan. Bila orang takut, ia akan cenderung berbuat jahat dan ternyata bukan hanya orang, binatang juga demikian. ABRI pun juga. Kalau dia takut dia akan menjadi ganas. Karena apa? Karena kalau dia takut, dia merasa terancam dan hanya memiliki dua pilihan. Pertama, jika dapat, dia

akan menyogok sumber yang menakut-nakuti itu. Bila tidak, maka sumber itu akan dibinasakan.

Oleh karena itu, jika kita mau berbuat baik menurut tuntunan agama kita masing-masing, kita tidak perlu takut. Dan itu tidak mudah. Menurut saya, kita harus mengatasinya. Lantas bagaimana caranya? Kita punya senjata. Memang tidak sempurna, tidak paling ampuh, yang bernama rasionalitas, seperti ilmu pengetahuan dan pers kampus. Ini merupakan senjata, sebuah medan di mana kita harus mengatasi sendiri ketakutan-ketakutan itu. Kalau kita sudah memiliki ilmu, seharusnya berani bertanya tentang apa saja. Apakah benar ilmu itu ada? Sampai hal yang paling ekstrem. Maka saya berpikir, teman-teman di kampus yang membikin penerbitan sebetulnya punya peran yang tidak main-main.

Karena peran itu-maaf-sudah dilecehkan dosen-dosen Anda. Banyak pimpinan universitas Anda sudah takut lebih dahulu. Mengapa takut? Sebabnya bermacam-macam. Bisa jadi karena salah mengerti atau karena banyaknya kepentingan. Sementara anak-anak muda ini tidak punya sesuatu yang ditakuti untuk hilang (tertawa). Jadi, mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis. Ilmu di kepala Anda dan iman di hati ini tidak bisa hilang selama hidup kita. Inilah kekuatan luar biasa yang kita punya. Pada masa sekarang, kadang-kadang kita menjadi minir, cerewet, kalau kita katakan generasi muda memiliki posisi yang strategis. Padahal yang saya katakan ini berbeda. Yang ada di kepala saya adalah sejarah dunia. Khususnya tahun 20-an di seluruh dunia di Eropa, Rusia, di Indonesia, di mana-mana bangsa itu dipimpin oleh anak-anak muda yang berumur 20-an tahun. Saat ini, cerita itu sudah hilang, oleh



Soal HAM. Omong kosong dengan permasalahan itu.

SPECIAL

SPESIAL

EDITOR



Dialog Soeharto dan mahasiswa, 1974. Menjembatani dua kutub.

karenanya saya perlu mengingatkan. Sebab sekarang semua hak dan kekuasaan telah dirampas oleh orang-orang yang berusia di atas 40-an tahun. Masa akan mengadakan diskusi saja mesti minta ijin. Jaman dulu tidak ada. Masa akan membacakan proklamasi harus ijin terlebih dulu ? Kan tidak bisa .

Saya bukan melamun ke jaman 20-an. Maaf saya bukan akan mengejek, tapi saya cukup mengikuti perkembangan aktifitas mahasiswa. Kalian antar kota saja sudah uring-uringan, nggak mau ngomong. Acapkali, kawan-kawan aktifis Thailand, Malaysia dan Philipina mengirim surat pada kita untuk tukar menukar informasi. Tetapi bila Indonesia diundang, yang berangkat KNPI. Ya tidak bisa bicara. Lha ini bagaimana. Sulit memang, tetapi tidak mustahil.

Melihat atmosfer politik kita, rasa takut itu kayaknya wajar. Seperti kasus-kasus golput di Semarang, apakah ini menjadi preseden ?

Sebenarnya bukan preseden. Karena hal tersebut sejarahnya amat panjang. Jadi salah kalau di bilang preseden. Algojo yang menghukum Lukas dan Poltak telah berumur 80 tahun. Pasal ini dirancang oleh Gubernur Jenderal Edenberg 15 Maret 1914, kemudian disahkan menjadi hukum pidana pada tahun 1918. Pasal tersebut digunakan untuk mengancam, khususnya wartawan nasionalis Indonesia. Waktu itu korbannya hanya dan terutama wartawan. Terakhir kali, pasal penghinaan 154-156/207 KUHP dikenakan pada Ashadi Siregar, pada tahun 1973. Selanjutnya setelah tahun '1974, kalau

mau menghantam pers, tidak perlu memakai pasal itu. Tidak perlu memakai pengadilan. Namun militer langsung, lewat Kopkamtib. Setelah peristiwa Malari, untuk melarang suatu penerbitan tidak melalui proses pengadilan. *Kesuwen*. Militer *dueng*...., dan tidak bisa apa-apa lagi. Hal ini terjadi pada gerakan mahasiswa tahun 1978.

Selanjutnya, pada tahun 1982 beralih melalui peraturan Menpen yakni lewat SIUPP hingga saat ini. Dan hal ini juga tidak melalui proses pengadilan. Itu sadis. Yang mau saya katakan, perhatikan siapa yang mau

memperjuangkan atau menanyakan apakah peraturan itu sah. Nggak ada. Artinya itu ada, satu atau dua orang tapi gagal. Yang saya perhatikan, sesudah tahun 1989 dan 1990, pasal penghinaan nggak pernah menganggur, dia berganti mangsa. Spesialisasinya menghantam gerakan mahasiswa. Pertama kali dialami oleh Isti Nugroho, setelah itu anak-anak ITB (kasus 5 Agustus 1989). Selanjutnya, Timor-Timur, kemudian Yayasan Geni dan yang terakhir kasus golput di Semarang. Namun lucunya, ketika udah tidak mengobrak-abrik pers, malahan ganti mahasiswa. Wartawan-wartawan tidak mengerti, apa itu pasal penghinaan. Padahal dahulu adalah musuh bebuyutannya. Musuh pers sendiri. Nah, ini gimana (tertawa). Jadi perlu sekali gerakan pencerdasan kehidupan bangsa. Betul kok. Banyak yang tidak tahu tentang hal itu. Ini mengerikan sekali.

Seringkali kita sudah kalah bukan dalam arti kekuasaan, melawan ABRI dengan senapan. Tetapi ilmu saja, kita sudah kalah. Contohnya saya melihat di bidang hukum, banyak sekali peraturan-peraturan yang dipertanyakan legalitas status hukumnya. Misalnya peraturan yang mengharuskan Anda minta ijin untuk membuat diskusi. Peraturan itu harus kita pertanyakan. Ini legal nggak. Apa dasarnya. Kita sudah terlebih dulu kalah. Nggak ada ijin. "Mana ijin saudara, tanya saya ?" Disinilah kita sudah kalah. Dianggap ijin itu memang harus ada. Kalau kita perhatikan, pasal yang ada dalam UUD saja mengatakan, khususnya dalam pembukaan bahwa "kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Kedua, hak

untuk berbicara kita itu ada “. Namun mengapa peraturan itu kok tidak melanggar UU, mestinya kan harus diadili. Jadinya kita mendukung peraturan yang salah, setelah itu kita lantas dihajar mereka karena kita dianggap salah.

Oleh sebab itu, takut bukan bersumber dari ketidakberanian. Tetapi bersumber dari ketidaktahuan. Makanya kecerdasan senantiasa membahayakan keamanan. Dan karena itu, kecerdasan selalu ditindas (tertawa). Lalu fungsi pers, kalau tidak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu apa ? Saya siap berdebat mengenai soal-soal demikian. Saya akan bertanya “apa benar kita adalah orang yang tidak berdaya diinjak-injak oleh pemerintah?” Kelihatannya tidak. Kita menjajah diri sendiri, menakut-nakuti kita sendiri, karena kita tidak tahu.

Pemerintah sepertinya menawarkan perubahan, khususnya lewat KNHAM, bagimana ini ?

Omong kosong lah. Kalau mereka mau memperbaiki HAM, itu omong kosong. Sebab berarti mengurangi kekuasaan mereka sendiri. HAM hanya bisa dibikin, menurut saya jika mempunyai validitas dan kredibilitas. Apabila dia didirikan dan didukung oleh orang-orang yang paling menderita akibat dari penyelewengan HAM, bukan oleh orang-orang yang menindas HAM. HAM hanya punya validitas dan kredibilitas, bila didirikan oleh orang-orang yang jadi korban penindasan HAM. Misalnya mereka yang tidak diberi hak berdiskusi, bukan orang yang melarang. Logikanya kan begitu ? Orang yang tak boleh berserikat bila dia menjadi buruh, mereka lah yang berhak mendirikan HAM, KNHAM itu mereka!

Apalagi timingnya tepat untuk menyambut CGI ?

Ya jelas. Dari situ saja kelihatannya.

Mengamati pelaksanaan HAM di Indonesia, sejauh mana mal praktik HAM berlangsung dan terjadi ?

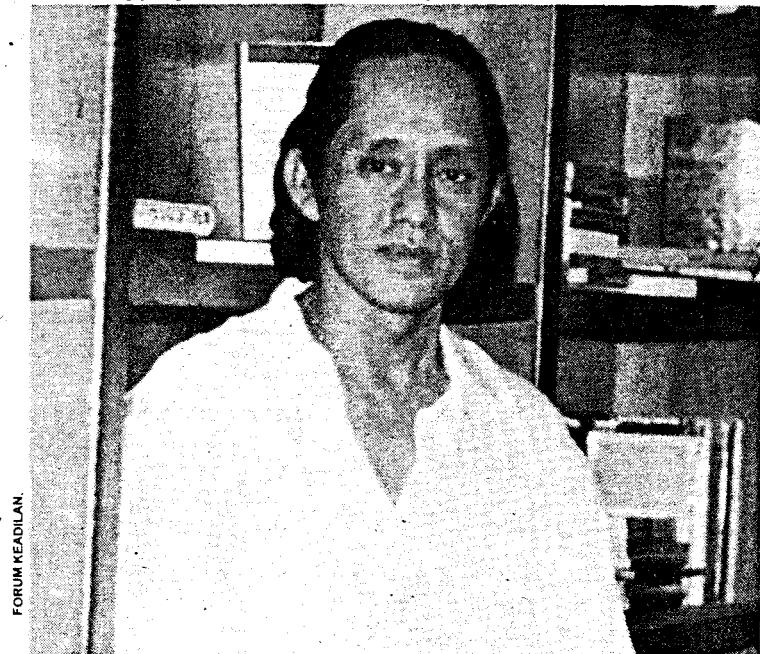
Saya katakan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling jelek rekord HAM-nya di

dunia. Paling jelek. Dan negara kita selalu disorot bangsa lain. Selaku bangsa Indonesia, saya malu. Saya mendengar dari warta berita Radio Australia, kongres Amerika Serikat mau memberikan ultimatum, akan membuka impor untuk Indonesia lk USD 600 juta apabila hak-hak buruh tidak diperbaiki. Dan kabarnya hari ini, pemerintah buru-buru membuat komisi khusus untuk menanggulangi masalah itu. Coba perhatikan. Kalau mahasiswa yang menuntut, nggak bakalan bikin komisi. Namun bila Amerika yang ribut, jadinya akan lain. Jadi kepada siapa bangsa ini bertanggung jawab? DPR kita itu bertanggung jawab pada siapa, siapa pemilik kedaulatan tertinggi di negeri ini ? Siapa ?

Tentang peranan intelektual kita yang oleh Ahmad Sobari diistilahkan mengalami kemarau panjang ?

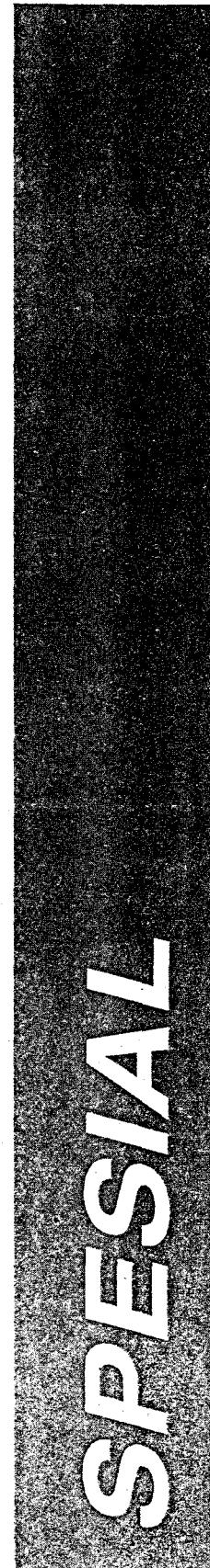
Itu berlebihan kalau menurut saya. Setidaknya, menurut saya, ada dua kesalahan. Secara sejarah faktual, itu sudah salah, kalau menganggap saat ini terjadi krisis. Apakah jaman dulu begitu hebat, jaman revolusi gerakan. Itu omong kosong. Sama saja kok. Secara moral ideologis politis, hal itu membunuh setiap upaya orang memperjuangkan perbaikan nasib bangsa ini.

Bangsa kita maupun bangsa lain, memiliki kecenderungan selalu meromantisir masa lalu. Nah, orang-orang seperti Sobari dan masih banyak yang lain di Indonesia, saya khawatirkan memiliki romantisme ke masa lama penuh seperti itu. Di Yogyakarta, para seniman juga meromantisir masa ketika



Setyawan Jodi . Pengusaha pribumi yang sukses.

SPECIAL



ARIEF ARYONO.



Demo SDSB .Siraman air dalam kemarau panjang pergerakan.

Malioboro menjadi pusat nongkrongnya para seniman. Sekarang sudah tidak lagi. Romantisme yang seperti inilah yang saya maksudkan. Jadi menurut saya, setiap jaman selalu memunculkan intelektualisme. Dan selalu sulit. Percayalah, itu gunanya belajar sejarah.

Sebenarnya itu diarahkan pada kalangan kampus yang seperti ketakutan?

Tapi jangan mengatakan, bahwa sekarang lebih hebat. Tidak. Yang saya maksudkan begini. Benar bahwa terjadi mayoritas menjadi penjilat, plin-plan. Namun itu bukan hal yang unik untuk jaman sekarang. Semua jaman mengalami hal demikian. Di mana saja. Sebagian besar umat manusia tidak mau berjuang, namun kalau sudah terjadi perubahan ikut numpang mencari rejeki.

Jadi maksud saya, Anda jangan berkecil hati. Jangan menunggu perubahan dari dosen-dosen anda. Hal itu tidak bakalan datang. Siap-siaplah kesepian, siap-siaplah nggak dimengerti. Itu tidak apa-apa. Daripada nelangsa, kemarau panjang, itulah yang tidak saya setujui. Jika Anda ingin menjadi aktifis pers, siap-siaplah kesepian dan dianggap gila.

Dianggap gila?

Ya, dianggap gila. Dan yang menganggap gila itu bukan Kodim atau Korem, tetapi teman, Ayah, bahkan pacar kita sendiri. Hal itu dialami oleh semua orang yang idealis di jaman apapun. Itu yang seharusnya dibongkar oleh sejarah. Sejarah tidak

banyak bercerita seperti ini. Bukan berarti kita merasa paling benar. Berbahaya kalau demikian. Cuma, jangan menunggu semua orang seperti kita. Tidak bakal ada.

Tentang kelas menengah di Indonesia seperti yang Anda tulis?

Intinya, saya cuma mau mengatakan bahwa pertama, kelas menengah itu bukan berarti tidak ada. Kedua, menurut saya, banyak anggapan orang yang salah jika kelas menengah diidentikkan dengan mereka yang mau menjadi pejuang, pro demokrasi, idealis, sehingga kalau tidak demikian diasumsikan bukan kelas menengah yang

sesungguhnya. Kelas menengah dimanapun, bersifat campuran. Jadi, menurut saya, kelas menengah sama dengan kelas yang lain. Pertama kali, mereka tentu juga memperjuangkan kepentingan kelasnya dan jangan diharapkan lalu memperjuangkan rakyatnya. Yang harus diingat bahwa perjuangan kelas menengah untuk memperjuangkan kepentingan sendiri dalam beberapa hal juga akan menguntungkan dan dinikmati oleh kelas yang lebih kecil. Contohnya, kalau pers kita ajak berjuang untuk mencabut aturan-aturan tentang SIUPP, itu bukan berarti pers ingin berjuang untuk rakyat, namun untuk dirinya sendiri, khan? Supaya dia bebas menulis. Seandainya pers bebas, saya juga percaya kalau tidak hanya pers yang beruntung, namun juga orang-orang lain. Tetapi khan berbeda kalau pers kita katakan berjiwa pembela rakyat. Ya tidak ada. Dia itu membela pasaran tirasnya sendiri. Ini argumen saya, bila mau dianalisis secara kritis. Namun hal demikian tidak jelek, karena hal ini kemungkinan juga menguntungkan orang lain, gitu lho.

Sejak jaman Syarekat Dagang Islam, kita melihat Islam dan pribumi mempunyai tradisi dan kemampuan dagang yang luar biasa. Hanya karena faktor represifitas politik saja, mereka tidak diberi kesempatan yang sama. Kalau para pedagang Cina diberi kesempatan, hal itu hanya karena mereka dipandang *tidak berbahaya*. Mereka tidak mampu menggantikan posisi Jenderal-jenderal yang ada di

Cendana, namun lain halnya dengan kaum pribumi dan Islam. Inilah yang menakutkan.

Jadi, maksud saya adalah jika ada liberalisasi ekonomi pada kelas menengah, jangan lupa bahwa mungkin orang lain juga diuntungkan. Karena apa? Sebab, dengan begitu, harga barang akan menjadi lebih murah, dikarenakan adanya kompetisi. Misalnya saja dalam hal cengkeh. Kondisi harga cengkeh sampai begitu parah, karena tidak ada suatu kompetisi. Yang ada adalah monopoli. Bila petani cengkeh diberi kesempatan dalam hal liberalisasi ekonomi, bisa jadi mereka akan juga diuntungkan.

Namun hal demikian saat ini tidak ada. Menurut saya, kelas menengah itu kelas yang egois. Tapi bukan hanya terjadi pada kelas menengah saja. Semua kelas bersifat egois kok. Tetapi jangan kemudian dianggap hal ini negatif, jelek. Sebab, ada unsur-unsur progresif di dalam sejarah. Bila diminta memilih antara memperjuangkan kepentingan keraton, militer atau pers, maka saya cenderung memilih pers.

Relevansinya dengan perubahan-perubahan di negara lain?

Nah, ini susahnya. Bila melihat situasi ini, kita seharusnya kembali kepada teori-teori ilmu sosial. Terdapat beberapa syarat untuk menuju suatu perubahan. Salah satu diantaranya, adalah idealisme, kemampuan organisasi, komitmen. Itu harus ada. Namun bila hanya ini saja, maka tidak cukup. Di Indonesia syarat ini sudah ada, meskipun tidak banyak. Termasuk Anda semua. Kedua, timing. Timing ini ada beberapa macam. Hal itu bisa dijelaskan lewat syarat ketiga, yaitu krisis struktural. Jadi struktural disini, memiliki hubungan dengan semangat. Krisis dapat terjadi dalam hubungan ekonomi maupun politik. Tidak bisa ditentukan dan dijadual. Di Eropa krisis ini biasanya berupa kebangkitan revolusi teknologi, atau industri. Sementara di Indonesia sendiri, bukan berarti tidak ada krisis. Namun krisis yang terjadi banyak

macamnya. Kita belum menyaksikan krisis yang besar. Bagi saya, tahun 1965 merupakan krisis yang sesungguhnya. Kegagalan sebuah generasi terdidik untuk menyelenggarakan pemerintahan bangsa ini. Dan digantikan generasi yang terlatih secara militer. Nah, apa yang terjadi di Indonesia pada Orde Baru ini, sudah diinginkan, diharapkan, diperjuangkan, sejak dahulu. Jadi tidak pernah berkembang, tidak pernah diberi kesempatan oleh Orde Lama.

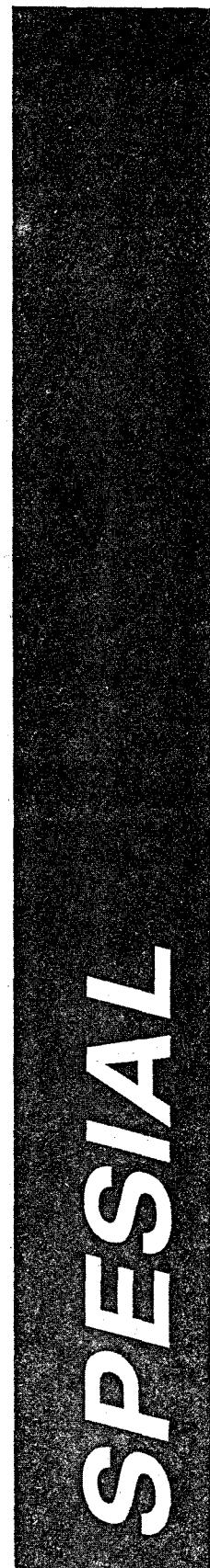
Terus bagaimana prospek perubahan dalam jangka panjang?

BEGINI, peristiwa Malari, 1974, itu memiliki backing. Tidak tanggung-tanggung, backingnya adalah Kopkamtib. Bahkan para analis politik di luar negeri menganggap Kopkamtib sebagai negara di dalam negara. Gerakan mahasiswa tahun 1978 pun juga dibacking. Lantas bila Anda tanya bagaimana strateginya? Menurut saya, saat ini, bila hanya mandiri, tidak akan kuat. Tidak bisa. Kekuatan backing kita yang terbaik minimal adalah seperti yang telah saya sebut dimuka - kelas gerakan pro demokrasi, kelas gerakan di tingkat internasional. Selama aktivis gerakan kelas menengah di Indonesia masih kurang pergaulan, masih mengucilkan diri dari pergerakan Internasional, situasinya akan terus seperti ini.

Kita mesti ingat, salah satu keberhasilan perjuangan orang-orang Timor-Timur disebabkan propaganda internasionalnya. Yang saya maksudkan, kemampuan bergaul secara internasional. Inilah yang



Demo yang lain .Menuntut menteri mundur.



juga dilakukan para aktivis tahun 20-an.

Jika mengharapkan perubahan dari sukses yang akan datang, apakah tidak berlebihan?

Perubahan yang dimaksud itu apa? Di Indonesia yang acapkali terjadi adalah perubahan penguasa, bukan perubahan sosial. Sejak jaman Belanda hingga kini, situasi sosial masyarakat kita tetap seperti ini. Pembangunan, pendidikan, tetap sama. Juga ketakutan, hukum, masih seperti dulu. Tetapi penguasanya berubah-ubah. Saya membayangkan perubahan sosial itu adalah apabila kualitas dan kuantitas kedaulatan rakyat berubah. Ini saja! Amat sederhana. Jika rakyat sudah merasa tidak ketakutan lagi, bebas ngomong, berserikat, bisa memilih yang dicintai. Itulah yang dinamakan demokrasi. Namun bila saat ini, *mereka* yang memilih kita, bukannya kita yang memilih *mereka*, lha itu sudah tidak benar.

Rakyat merupakan sumber tertinggi dari segala peraturan. Tetapi dewasa ini, terbalik semua. Yang bersalah bukan petugasnya, sebab mereka hanya sekedar menjalankan tugas. Rakyat sendiripun juga bersalah. Sebab rakyat percaya, jika mereka hanya hamba-hamba, kawula alit. Itu kan salah ha...ha...ha...Tidak sesuai dengan pembukaan UUD kita, jiwa proklamasi kemerdekaan, iya khan?

Jadi keadaannya masih sama, belum ada perubahan?

Makanya, kita harus panjang sabar. Jangan

terlalu berharap! Seandainya terjadi sukses, paling banter hanya ganti orang saja. Selama ini belum ada perubahan pada tingkat ini, jika rakyat sudah mendapatkan peningkatan kualitas dan kuantitas kedaulatannya. Artinya apa? Artinya, dia (rakyat) tidak takut kepada penguasa, bukan karena menjilat. Ini saja sudah lebih baik.

Saya membayangkan demokrasi adalah apabila penguasa tersebut tidak berani menyatakan kebencian, permusuhan dengan rakyat. Lha ini baru disebut demokrasi!

Kita berhak mencopot penguasa yang tidak demokratis. Mestinya kan begini! Itu bedanya antara jaman kolonial dengan jaman kemerdekaan.

Tentang pro kontra universalisme HAM ?

Di dunia ini, tidak ada yang universal. Baik HAM, maupun bukan HAM. Tetapi bukan berarti HAM-nya Barat tidak relevan untuk bangsa kita. Saya kira justru malah relevan. Tetapi sekali lagi bukan berarti Universal. Bila berasal dari produk Barat, saya tidak rela dikatakan universal. Itu sama saja dengan menguniversalisasi kekuasaan modernitas Barat, saya enggak setuju.

Sebagai isme, gerakan itu (HAM, red) seperti halnya nasionalisme. Itupun juga tidak universal. Nasionalisme merupakan produk kebudayaan modern abad 20. Jelas sekali. Bila universal, maka telah ada sejak jaman dahulu. Mengapa HAM tidak dirumuskan saja oleh orang-orang di desa Tengger? Karena, jelas tidak universal tadi. Sebab ini merupakan produk Barat murni. Saya kira HAM itu tidak universal. Demikian juga kata Republik, khan juga berasal dari terminologi Barat. Demikian halnya dengan Presiden. Jadi bagi saya, perdebatan kita sudah tidak benar. Bila mau dikejar lagi, Pak Harto dan oknum-oknum yang mengatakan bahwa kita mempunyai jati diri kebangsaan nasional, maka

argumen ini bisa dikejar. Argumentasi itu dibikin oleh pemerintah kolonial, yakni di bidang Antropologi dan Hukum Adat. Mudah ! Bukannya Pak Harto yang membuat. Namun, pemerintah dan pendidikan kolonial Belanda.

Bila dikejar lagi, akan sampai pada sejarah politik Eropa abad 17, bahwa bangsa Timur itu lain, unik, khas. Bukan bikinan orang. Yang ingin saya katakan, baik Pak Harto maupun pengikut-pengikutnya, menurut saya sudah pangling pada sejarah. Kita bongkar tidak saja logika dan retorika Orde Baru, namun juga musuh-musuhnya. Kita harus memperbaikinya. Ada sesuatu yang salah. Jadi, perdebatan tersebut tidak relevan sekali. Sangat keliru bagi saya. Kita ini pangling, sehingga karena pangling, kita seringkali bingung.

Tentang perlunya serangan pada negara yang melanggar HAM, apakah beralasan ?

Oo, beralasan sekali. Jadi bagaimana ya, yang tidak universal bukan hanya HAM, tetapi semuanya. Baju kamu, bahasa kamu, itu tidak universal. Perasaan, cinta kasih, bahkan romantika. Itu produk dari sebuah sejarah sosial.

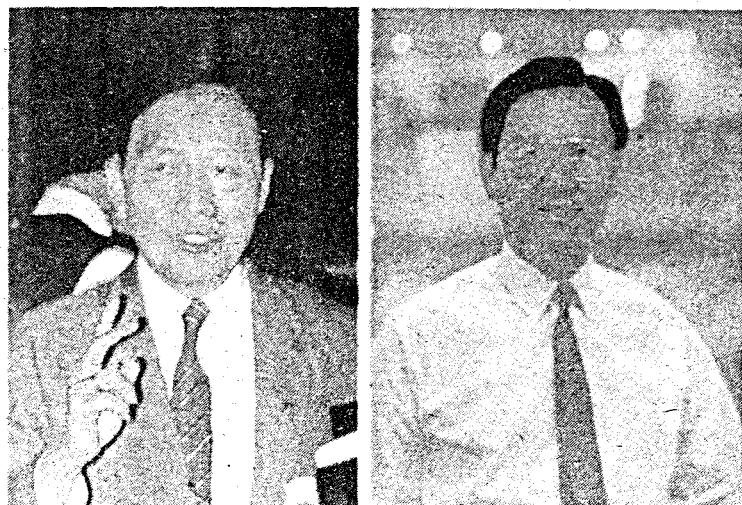
Sekarang kita kembali kepada HAM. HAM merupakan produk kebudayaan modern yang bersifat global, tidak universal. Sumbernya berasal dari bangsa Barat, tetapi pengolahannya sudah mengglobal. Artinya, bangsa-bangsa bekas jajahan, ikut menggodok. Dan jangan lupa, mereka tidak pasif, hanya tinggal menerima saja. Mereka juga ikut-ikutan memikirkan, merombak, turut berargumentasi dengan orang-orang Eropa. Sumbernya memang berasal dari Eropa, namun telah dirumuskan ke dalam suatu bentuk kesepakatan internasional. Peradaban internasional. Modern, lepas dari batas-batas Timur, Barat, sehingga pantas banget diserang. Dan lucunya lagi, jika sudah diancam dengan bantuan luar negeri, mau...ha...ha...

Lantas, adakah manfaat yang dapat kita tarik dari hasil Konferensi Wina ?

Jelas dong. Konferensi tersebut merupakan hasil maksimal dari kondisi yang ada sekarang. Anda tahu, saat ini terjadi pluralitas pemikiran dalam segala macam bidang, termasuk HAM. Forum persoalannya bukan saja antara Barat dan Timur, namun telah melebar hingga antara buruh dan non-buruh. Antara minoritas dan mayoritas, dsb.

Jadi dalam kondisi yang sulit seperti ini, saya kira pertemuan Wina sudah menghasilkan output maksimal, dan kita layak berterima kasih. Sudah barang tentu, hasil maksimal ini belum cukup di jaman ini. Belum tuntas untuk jaman-jaman yang lain. Inilah tugas generasi muda sekarang. Anda adalah generasi yang dibikin minder, selalu merasa kecil. "Kamu ini apa ? ...aaa...mahasiswa apa?...". Amat berbeda dengan pendidikan jaman Belanda yang mengajarkan: "Kalian ini adalah anak jaman!"

Arief, Ahad, Dayat, Rakhmat, Aan



Mochtar Riady dan James T. Riady .Terperangkap dikotomisme pri-non pri.

SPESIAL